

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

JALAN BANGUN PRAJA KAWASAN PERKANTORAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BANJARBARU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaa, kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

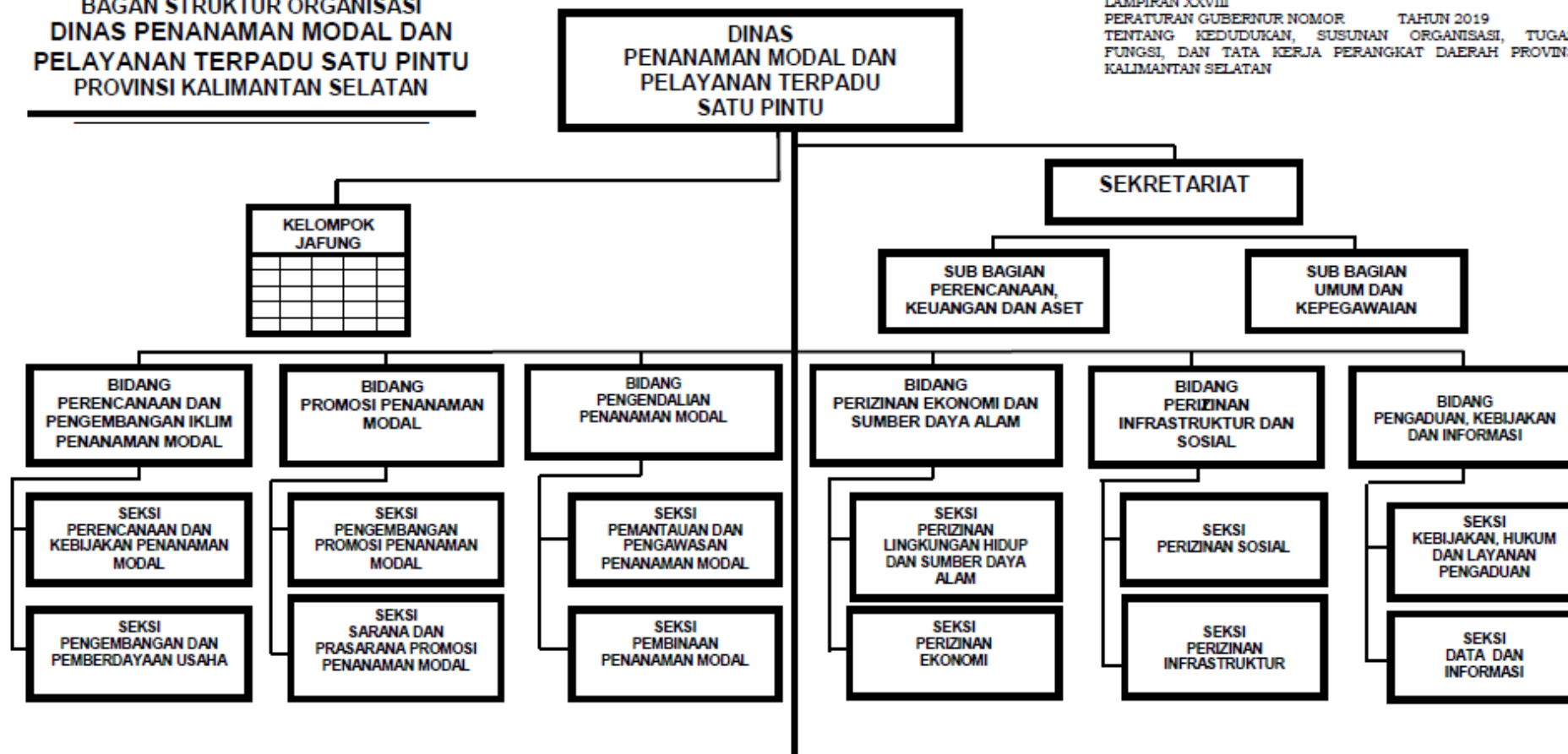
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari atas :

- a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal

- b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
- 4. **Bidang Promosi Penanaman Modal**, terdiri dari atas :
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Sarana Promosi Penanaman Modal
- 5. **Bidang Pengendalian Penanaman Modal**, terdiri dari atas:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal
- 6. **Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**, terdiri dari atas :
 - a. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
 - b. Seksi Perizinan Ekonomi
- 7. **Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial**, terdiri dari atas :
 - a. Seksi Perizinan Infrastruktur
 - b. Seksi Perizinan Sosial
- 8. **Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi**, terdiri dari atas :
 - a. Seksi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan
 - b. Seksi Data dan Informasi
- 9. **Kelompok Jabatan Fungsional**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN



D. Isu Strategis SKPD

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, mengalami perlambatan ekonomi
2. Dalam rangka *Recovery* Pemulihan Perekonomian akibat PANDEMI COVID-19
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Kalsel sebagai Gerbang Ibukota Negara
5. Hilirisasi Industri
6. Pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Perizinan dan Nonperizinan

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Menuju pelayanan prima;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. sarana dan prasarana belum optimal;
11. sistem informasi pelayanan belum optimal;
12. Keterbatasan Anggaran.

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Ketidakmerataan penanaman modal - Pelayanan belum optimal - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM. - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota - Sinkronisasi Perencanaan - Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;	- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan - Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan - Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan - Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi - Kesiapan kelembagaan penanaman modal - Kesiapan aparaturnya pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP, dapat disesuaikan sebagaimana contoh berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi urusan yang ditangani.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2021, dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2021

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 mengacu pada **Misi 5**.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
Kondisi 1) Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014), titik terendah pada 3,84% (2015 2.) Investasi di kalsel tahun 2014 mengalami penurunan, terutama di sektor tambang 3) Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan Isu 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perekonomian Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan, dan jasa serta Meningkatnya Investasi dalam Aktifitas Perekonomian. Strategi Pengembangan investasi baik industri kecil maupun besar	- Peningkatan Investasi: - meningkatkan peran dan kinerja penanaman modal untuk menarik investor. - Monev dan analisis dalam rangka menghimpun informasi permasalahan investasi - Mengkoordinasi permasalahan investasi, untuk diclearkan atau minimal dikurangi. - Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel. - Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel. - Meningkatkan peran dan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk peningkatan kualitas dan kemudahan perizinan di Kalsel	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: - Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi - Program Promosi Penanaman Modal - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi - Program Pelayanan Penanaman Modal - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi - Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Kinerja Utama	Indikator	Target
Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	10,83 Trilyun Rupiah
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)
Sekretaris	Peningkatan Nilai LAKIP	Nilai SAKIP DPMPTSP	BB (77.50)
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	0.05%
	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100%
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%
	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	90%
	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset yang tercatat	100%
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	90%
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	1 Dokumen
		Dokumentasi tpenyediaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen

		Jumlah Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	45 Orang
	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek	100%
Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28
		Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14
		Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen
	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen
		Persentase Aset dikelola	100%
Kabid Perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%
		Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%
		Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	25%
Kasi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen
		Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100% 8 Sektor
Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Pengembangan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	4 Kemitraan
Kabid Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Calon Investor	Persentase peningkatan Calon Investor	30% 4 Investor
		Persentase promosi yang ditindaklanjuti	25% 5 Promosi
Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	Persentase Potensi Investasi daerah yang diminati	50% 10 Potensi
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali

Kasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan Promosi Investasi	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One-on-One Meeting	3 Kali
Kabid Pengendalian dan Informasi PM	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	30%
		Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	50%
Kasi Pengawasan PM	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan
		Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen
Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%
Kabid Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	B (85)
		Persentase Permohonan yang dilayani	100%
		Persentase Usaha Berizin	90%
Kasi Perizinan Ekonomi	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar Pelayanan	100%
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang Dilayani	50 jenis Izin

Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang LH dan SDA yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100%
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang LH dan SDA yang dilayani	40 jenis Izin
Kabid Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	B (85)
		Persentase Permohonan yang dilayani	100%
		Persentase Usaha Berizin	90%
Kasi Perizinan Sosial	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sosial	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100%
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dilayani	20 Jenis Izin
Kasi Perizinan Infrastruktur	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100%
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dilayani	35 Jenis Izin
Kabid Pengaduan, kebijakan dan Informasi	Pelayanan, Pengaduan, Kebijakan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	B (85)
Kasi Data dan Informasi	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	2 Sistem

Kasi kebijakan, Hukum dan layanan pengaduan	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, telah ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)		
Urusan Penanaman Modal																	
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	5,4 T	7,1 T	1.640	8,1 T	1.968	9,2 T	2.362	10,5 T	2.834	12 T	3.401	10,83 T	4.082	10,83 T	
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	14.81	B (75)	350	B (77,50)	1.500	B (80)	1.861	B (82,50)	1.952	B (85)	2.343	B (85)	2.821	B (85)	

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	5.4	7,1	8,1	9,2	10,5	12	10,83

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut

diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- a. *Lebih dari 90%* untuk kategori capaian **Sangat Memuaskan**;
- b. *80% s/d 90%* untuk kategori capaian **Memuaskan**;
- c. *70% s/d 80%* untuk kategori capaian **Sangat Baik**;
- d. *60% s/d 70%* untuk kategori capaian **Baik**;
- e. *Diatas 50% s/d 60%* untuk ketegori capaian **Cukup**;
- f. Kurang dari 50% untuk kategori capaian **Kurang**;

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa serta Meningkatnya Investasi dalam Aktifitas Perekonomian	Peningkatan Investasi dengan indikator : 1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *ouput* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peningkatan Investasi dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 2 (dua) indikator yakni: Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi investasi PMA dan PMDN dengan capaian tahun 2021 **117,41%** masuk dalam klarifikasi **Memuaskan**. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian **105.00%**** juga masuk dalam klarifikasi **sangat memuaskan**.

2. Esselon II (Kepala Dinas)

Terdapat 2 (dua) Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Esselon II) yakni:

- a. Peningkatan Investasi dengan indikator : Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) kinerja utama dan 2 (dua) indikator dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	10.830.000.000.000	12.715.000.000.000	117,41%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya.	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel, BKPM RI
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)	A (89,25)	105,00%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					111.20%		

Penjelasan :

Pada Kinerja Peningkatan Investasi dengan indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN, tahun 2021 ditargetkan sebesar 10.83 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **12,71 triliun rupiah** sehingga capaian kinerja sebesar **117,41%**.

Rumus indikator realisasi investasi PMA dan PMDN yaitu Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya.

Pada Kinerja kedua yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan B dengan nilai 85. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 89,25**, sehingga kinerja mencapai **105,00%**.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuesioner kepada pelanggan

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2020 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	12.000.000.000.000	7,756,307,320,000 (64,64%)**	10.830.000.000.000	12.715.000.000.000 (117,41%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)	A (88.35) 103.94%	B (85)	A (89.25) 105.00%

Penjelasan

Indikator realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2020 triwulan IV mencapai Rp7,756,307,320,000 (64.64%). Sedangkan pada tahun 2021 12.715.000.000.000 (117,41%)**, meningkat dari capaian tahun sebelumnya.

Indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2020 sebesar 88.35, sedangkan tahun 2021 dengan nilai 89.25 dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017. Adapun unsur penilaian sebagai berikut:

- Persyaratan
- Prosedur
- Waktu pelayanan
- Biaya/tarif
- Produk Layanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Sarana dan prasarana
- Penanganan pengaduan dan masyarakat

b. Perbandingan kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPTSP PROV. KALSEL):																			
- Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	5,43	7,10	9,51	133.87%	8,10	6,25	77.15%	9,20	11,70	127,73%	10,50	15,65	149,09%	12,00	7.76**	64.64%	10,83	12.71	117.41
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B (75)	B	TERCAPAI	B (77,50)	B (78,70)	TERCAPAI	B (80)	A (82,61)	TERCAPAI	B (82,50)	B (85.78)	103.98%	B (85)	B (86.77)	102.08 %	B (85)	A (89.25)	TERCAPAI

c. Perbandingan Realisasi kinerja tingkat Regional dan Nasional

	Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Indonesia
Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	12,72	8,73	17,54	41,18	5,74	901,02

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2021, target yang telah ditetapkan diperkirakan akan tercapai. Hal ini dikarenakan situasi yang sudah mulai normal pasca pandemic covid 19.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, *one-one meeting*, dan lainnya.
6. *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.

10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 10.83 triliun rupiah, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2020 sebesar 7,76 triliun rupiah atau 64,64% dari target dimana tidak mencapai target tahun 2020 sebesar 12 Trilyun. Realisasi investasi terkendala akibat Covid 19 sehingga banyak perusahaan yang menunda realisasi investasinya.

Disisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pengukur kepuasan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 sebesar 88.35 dengan predikat A , sedangkan tahun 2021 sebesar 89.25 dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang

dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga *Front Officer*
7. Tersedianya *Help Desk*
8. Implementasi perizinan secara *online* dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan *Online Single Submission* (OSS)
9. *Digital Signature* untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

4) Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- v. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Moda

- b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - ii. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
- III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:

- i. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Esselon III (Sekretaris)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB (82,50)	A (85,10)	103,15%	Persentase Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas PM dan PTSP
2	Meningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	0,50%	1,25%	249,85%	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	Dinas PM dan PTSP
3	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80,00%	80,00%	100,00%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	Dinas PM dan PTSP
4	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100,00 %	101,33%	101,33%	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	90%	100,00%	111,11%	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	Dinas PM dan PTSP
5	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%)	100%	100,00%	100,00%	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%)	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	90%	86,17%	95.74%	Persentase serapan anggaran SOPD	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					122.84%		

Penjelasan

1. Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu 85.10 yang merupakan penilaian dari beberapa komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.
2. Indikator kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP yaitu 1.25% meningkat dari capaian tahun sebelumnya
3. Indikator persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD yaitu 101.33%
4. Indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD yaitu 80%
5. Indikator persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham yaitu 100% (seluruh peserta yang melaksanakan diklat/bimtek telah memahami)
6. Indikator persentase aset yang tercatat yaitu 100% (seluruh aset tercatat)
7. Indikator Penyerapan anggaran SKPD tahun 2021 mencapai 86.17%

Kinerja Sekretaris Dinas (esselon III) dengan 7 (tujuh) indikator menghasilkan rata-rata capaian 122.84% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR	2020		2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	BB (77,5)	A (84,05)	BB (82,5)	A (85,10)
2	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	0.5%	1,97%	0.50%	1,25%
3	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100,00%	101,33%	100,00%	101,33%
5	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	90%	100,00%	90%	100,00%
6	Persentase Aset yang tercatat	100%	100,00%	100%	100,00%
7	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	90%	98,10%	90%	86,17%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan BB dengan nilai 82.50 dan terealisasi **A dengan nilai 85.10**, sehingga kinerja mencapai **103.15%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP ditargetkan 0.05% dan terealisasi **1,25%**, sehingga kinerja mencapai **249,85%**.

Indikator Ketiga yaitu Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD ditargetkan 100% dan terealisasi **101.33%**, sehingga kinerja mencapai **101.33%**.

Indikator Keempat yaitu Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ditargetkan 80% dan terealisasi **80%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Kelima yaitu Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham ditargetkan 90% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **111.11%**.

Indikator Keenam yaitu Persentase Aset yang tercatat ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketujuh yaitu Persentase Penyerapan Anggaran SKPD ditargetkan 90% dan terealisasi **86.17%**, sehingga kinerja mencapai **95,74%**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	BB (77,5)	A (84,05)	BB (82,5)	A (85,10)
2	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	0,05	0,19	0,50	1,25
3	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100,00 %	101,33%	100,00%	101,33%
5	Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham	90%	100,00%	90%	100,00%
6	Persentase Aset yang tercatat	100%	100,00%	100%	100,00%
7	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	90%	98,10%	90%	86,17%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan BB dengan nilai 77.50 dan terealisasi **A dengan nilai 85.10**, sehingga kinerja mencapai **108.45%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP ditargetkan 0.50% dan terealisasi **1,25%**, sehingga kinerja mencapai **249,85%**.

Indikator Ketiga yaitu Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD ditargetkan 80% dan terealisasi **80%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Keempat yaitu Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **125.00%**.

Indikator Kelima yaitu Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham ditargetkan 90% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **111.11%**.

Indikator Keenam yaitu Persentase Aset yang tercatat ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketujuh yaitu Persentase Penyerapan Anggaran SKPD ditargetkan 90% dan terealisasi **86.17%**, sehingga kinerja mencapai **95,74%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implelementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2021.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran.

4) Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- v. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1) Esselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Menyusun Data Kepegawaian Evaluasi, serta administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen terkait administrasi kepegawaian	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Pegawai yang administrasi Kepegawaia nnya dilayani secara tertib	75 Orang	79 Orang	105,33%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	Dinas PM dan PTSP
2	Melaksana n Peningkatan Kapasitas SKPD	Jumlah Peserta Pelatihan/Bi mtek yang paham	8 Orang	8 Orang	100,00%	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	Dinas PM dan PTSP
Rata – rata Pencapaian					101.33%		

Penjelasan :

- Indikator jumlah dokumen pelayanan surat menyurat adalah surat keluar dan masuk terdokumentasi seluruhnya selama 12 bulan
- Indikator jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana adalah tersedianya dokumen Pengadaan Barang dan jasa sesuai yang teranggarkan dan direalisasikan
- Indikator jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib adalah menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi kenaikan gaji berkala, Pembuatan KARIS/KARSU dan surat ijin cuti, Kenaikan pangkat, usul pensiun, Usul penerima tanda penghargaan satyalencana karya satya

- Indikator jumlah peserta pelatihan/bimtek yaitu mengikuti Bimtek Sicantik Cloud Aplikasi perizinan Online, Diklat tata Naskah kedinasan, Diklat Produk Hukum, Bimtek pengadaan Barang dan Jasa, dan Bimtek Inpres P4GN Tahun 2020

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 101.33% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 4 (empat) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

N O	INDIKATOR KINERJA	2019	2020		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Jumlah Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	111 Orang	75 Orang	79 Orang	105,33%
4	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek	19 orang	8 Orang	8 Orang	100,00%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Kedua yaitu Jumlah Dokumen terkait Sarana dan Prasarana ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketiga yaitu Jumlah Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib ditargetkan 75 Orang dan terealisasi **79 Orang**, sehingga kinerja mencapai **105.330%**.

Indikator Keempat yaitu Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek ditargetkan 8 Orang dan terealisasi **9 Orang**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

N o	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen 100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen 100,00%
2	Dokumentasi Penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen 100,00%	100%	100,00% 100.00%
3	Jumlah Pegawai yang administrasi Kepegawaian ya dilayani secara tertib	75 Orang	79 Orang 105,33%	45 Orang	46 Orang 102,22%
4	Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	8 Orang	8 Orang 100,00%	100%	100,00% 100.00%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Menyurat pada tahun 2020 terealisasi **1 Dokumen dengan capaian 100%**.sedangkan pada tahun 2021 terealisasi **1 Dokumen dengan capaian 100%**.

Indikator Kedua yaitu Dokumentasi Penyediaan sarana dan prasarana pada 2020 terealisasi **1 Dokumen dengan capaian 100%**.sedangkan pada tahun 2021 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.

Indikator Ketiga yaitu Jumlah Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib pada tahun 2020 terealisasi **79 Orang dengan capaian 105.33%**. sedangkan pada tahun 2021 terealisasi **46 orang dengan capaian 100%**

Indikator Keempat yaitu J Persentase Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham, pada tahun 2020 terealisasi **8 Orang dengan capaian 100.00%**, sedangkan pada tahun 2021 **100% dengan capaian 100%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya –upaya yang telah dilakukan

- Melakukan penertiban format perumusan surat keluar/surat masuk di tiap-tiap bidang dan sekretariat kantor
- Melakukan penertiban format perumusan surat izin/kode surat izin dibidang perizinan
- Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
- Merekap segala urusan administrasi seluruh pegawai kantor

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pengarsipan surat menyurat dan dokumen perizinan yang belum terorganisir
- Ruang sarana pengarsipan surat/dokumen yang belum memadai
- Anggaran pelatihan/bimtek yang terbatas sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan pelatihan/bimtek kantor

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengatur dan mengorganisir mulai dari masuk surat sampai kepada pengarsipannya
- Mengajukan anggaran ditahun berikutnya untuk rehab/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dikantor

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Esselon IV (Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28,94	103,36%	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD	Dinas PM dan PTSP
		Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14,10	100,71%	Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	Dinas PM dan PTSP
2	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	Dinas PM dan PTSP
3	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase aset yang dikelola	1 Set	1 Set	100,00%	Jumlah Aset yang dikelola	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,81%		

Penjelasan :

Indikator Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP yaitu 28.94

Indikator Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP yaitu 14.10

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan 5 Dokumen yaitu Penyusunan LKPJ/LPPD, Penyusunan Renja Perubahan, Penyusunan Renja 2021, Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Laporan tahunan

Indikator jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen tersedianya laporan keuangan DPMPTSP Prov Kalsel Tahun anggaran 2021.

Indikator Persentase aset yang dikelola 100% yaitu Pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100.81% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28	28,94	103,36%
2.	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14	14,10	100,71%
3.	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
4	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

	Keuangan secara berkala				
5	Persentase Aset yang dikelola	1 Set	100%	100%	100,00%

Penjelasan :

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2020 1 buku, sehingga kinerja mencapai 100% yaitu tersedianya laporan keuangan DPMPTSP Prov Kalsel Tahun Anggaran 2020.

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2021 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**.yaitu tersedianya laporan keuangan DPMPTSP Prov Kalsel Tahun Anggaran 2021.

Indikator jumlah aset yang dikelola ditargetkan tahun 2020 1 set dan terealisasi **1 set** sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu pengadaan mebeleur

Indikator jumlah aset yang diadakan ditargetkan tahun 2021 100% dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

N o	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28,94 103,36%	28	28,94 103,36%
2	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14,10 100,71%	14	14,10 100,71%

3.	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen 100.00%	5 Dokumen	5 Dokumen 100.00%
4.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen 100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen 100.00%
5.	Jumlah Aset yang diadakan	1 Set	1 Set 100.00%	100%	100% 100.00%

Penjelasan :

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2020 1 buku, sehingga kinerja mencapai 100% yaitu tersedianya laporan keuangan DPMPTSP Prov Kalsel Tahun Anggaran 2020.

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2021 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**.yaitu tersedianya laporan keuangan DPMPTSP Prov Kalsel Tahun Anggaran 2021.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- Koordinasi intensif dengan Bappeda, Bakeuda, Biro Organisasi, dan Inspektorat

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implelementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2021.
- Pemahaman terkait indicator kinerja oleh stakeholder masih belum maksimal

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran
- Koordinasi terkait indikator kinerja dengan Biro Organisasi

3) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4. Esselon III (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan	100%	100% (8/8)	100%	Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kemitraan dibagi Jumlah Kemitraan Dunia Usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	100%	100% (20/20)	100%	Jumlah Potensi Investasi daerah yang dapat dipromosikan dibagi Jumlah Potensi Investasi di 13 Kab/Kota x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	25%	35% (7/20)	140%	Jumlah Potensi Investasi yang Berbasis Lingkungan dibagi Jumlah Potensi Investasi x 100%	Dinas PM dan PTSP

Rata-rata Capaian	113,33%		
-------------------	---------	--	--

Penjelasan :

- a. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan yaitu 8/8 kemitraan (100%) sehingga capaian nya 100%

Perusahaan Besar	UMKM
Vendor Bagas Mualang (Giant/Transmart)	Sri Eka Apriliana Pengrajin Sasirangan
Vendor Bagas Mualang (Giant/Transmart)	Yayuk Marlina Makanan ringan Labuana
BPD PHRI Kalsel	Hj Nazmi Atus Saadah Butik Melati Sasirangan
Vendor Bagas Mualang (Giant/Transmart)	Rusimah Usaha Dodol Madu kasirat Raisa
Vendor Bagas Mualang (Giant/Transmart)	Nur Ulfah Bubuhan sasirangan Kreative
BPD PHRI Kalsel	Erlina Sasirangan padang panjang
Bank Kalsel	Esti Desiana Prasetiyowati Rumah jahit Dearta
Bank Kalsel	Ema sofian Duo pemuda

- b. Persentase Potensi Investasi Dipromosikan sebanyak 20 potensi dengan capaian 100%

1. Kota Banjarmasin • Pusat Distribusi Regional Baiman • Kawasan Industri Terpadu Mantuil • Waste to Energy TPA Basirih • Pusat Infeksi dan Saraf Terpadu RSUD Ansari saleh • Pusat Jantung dan Kanker Terpadu RSUD Ulin
2. Kota Banjarbaru • Aero City • TPA Regional Banjarbakula • Geopark Pegunungan Meratus
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara

• Kalang Hadangan/Kerbau Rawa, Budidaya Ikan, Ternak Itik • Kampung Industri Furniture dari Alumanium
4. Kabupaten Tapin • PLTA Bendungan Tapin
5. Kabupaten Tabalong • Kawasan Peruntukan Industri Seradang, Pasar Agribisnis Kabupaten Tabalong
6. Kabupaten Kotabaru • KEK Mekar Putih • Wisata Sambar Gelap, Gedambaan • KI Sebuku
7. Kabupaten Tanah Bumbu • Bendungan Kusan • KI Batulicin
8. Kabupaten Tanah Laut • Peternakan sapi • Kawasan Industri Jorong • Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

- c. Persentase Potensi investasi yang berbasis lingkungan yaitu 7/20 dari potensi investasi dipromosikan sehingga capaian nya 140%

• Bendungan Kusan	• KEK Pariwisata Loksado
• PLTA Bendungan Tapin	• Geo Park Meratus
• Waste Energy TPA Basirih Banjarmasin	• Energy Bayu Tanah Laut
• TPA Sampah Banjar Bakula Banjarbaru	

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 113.33% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 3 (tiga) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021
----	-------------------	------	------

		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 Kerjasama	-	-	-
2	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	13 Potensi	-	-	-
3	Persentase Rekomendasi Hasil Rakor/Forum yang ditindaklanjuti	-	-	-	-
4.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	-	100%	100%	100%
5.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	-	100%	100%	100%
6.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	-	25%	35%	140%

Penjelasan :

- a. Indikator Pertama Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**
- b. Indikator Kedua yaitu Persentase Potensi Investasi dipromosikan pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100% (20 Potensi)** sehingga kinerja mencapai **100%**
- c. Indikator Ketiga yaitu Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **25%** dan terealisasi **35% (7/20 dari potensi investasi dipromosikan)** sehingga kinerja mencapai **140%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 Kerjasama	2 Kerjasama 100%	-	-

2	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	12 Potensi	12 Potensi 100%	-	-
3	Persentase Rekomendasi Hasil Rakor/Forum yang ditindaklanjuti	-	-	-	-
4.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	-	-	100%	100% 100%
5.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	-	-	100%	100% 100%
6.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	-	-	25%	35% 140%

Penjelasan :

Indikator Pertama Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Kedua yaitu Persentase Potensi Investasi dipromosikan pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% (20 Potensi) sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Ketiga yaitu Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 25% dan terealisasi 35% (7/20 dari potensi investasi dipromosikan) sehingga kinerja mencapai 140%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Terlaksananya Kemitraan dunia usaha antara pengusaha besar dengan UMKM se Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
- Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan dengan Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota se Kalsel mengenai potensi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Minimnya data potensi investasi di Kabupaten/Kota yang ada di Kalsel
- Kurangnya keterlibatan dan pemahaman dari DPMPSTSP Kabupaten/Kota terkait fasilitasi kemitraan UMKM dengan pengusaha besar
- Terbatasnya dana yang tersedia sehingga membuat terbatasnya kegiatan dan koordinasi dengan pusat maupun daerah

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan supervisi dan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota tentang fasilitasi kemitraan dunia usaha
- Menambahkan anggaran untuk kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim PM
- Melakukan monitoring/evaluasi baik tentang pelaksanaan kemitraan maupun pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi investasi di Kalimantan Selatan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

1) Esselon IV (Kasi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Identifikasi Potensi dan Kebijakan Investasi	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 %	100% (8 Sektor)	100%	Jumlah Realisasi Sektor Investasi dibagi Jumlah sektor Investasi pada RUPM x 100%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

- 1) Indikator Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan yaitu tersedianya Dokumen Investasi daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan
- 2) Indikator Persentase kesesuaian RUPM dengan sektor investasi adalah 100%(8 sektor) yaitu Potensi :
 - Sektor Pariwisata
 - Sektor Pangan
 - Sektor Infarastruktur
 - Sektor Energi
 - Sektor industri
 - Sektor Perdagangan
 - Sektor UMKM
 - Sektor Jasa

Kinerja esselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2020		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai standar	1 Dokumen	-	-	-
2.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 % (8 sektor)	100 % (8 sektor)	100 % (8 sektor)	100 %
3.	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Jumlah Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai standar sedangkan tahun 2020 ditargetkan **1 Dokumen** dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**, sedangkan tahun 2021 tidak adfa indicator pada tahun itu.

Indikator Kedua yaitu Persentase kesesuaian RUPM dengan sektor investasi tahun 2020 ditargetkan **100% (8 sektor)** dan terealisasi **100% (8 sektor)**, sehinggann kinerja mencapai **100%**, sedangkan tahun 2021

ditargetkan **100% (8 sektor)** dan terealisasi **100% (8 sektor)**, sehingga kinerja mencapai **100%**,

Indikator ketiga Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan tahun 2020 tidak ada indikator pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **1 Dokumen** dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**,

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	-	-
2.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 % (8 sektor)	100 % (8 sektor) 100%	100 % (8 sektor)	100 % (8 sektor) 100%
3.	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Jumlah Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai standar sedangkan tahun 2020 ditargetkan **1 Dokumen** dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**, sedangkan tahun 2021 tidak ada indikator pada tahun itu.

Indikator Kedua yaitu Persentase kesesuaian RUPM dengan sektor investasi tahun 2020 ditargetkan **100% (8 sektor)** dan terealisasi **100% (8 sektor)**, sehingga kinerja mencapai **100%**, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **100% (8 sektor)** dan terealisasi **100% (8 sektor)**, sehingga kinerja mencapai **100%**,

Indikator ketiga Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan tahun 2020 tidak ada indikator pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **1 Dokumen** dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100%**,

3) Analiasi Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Secara rutin melakukan koordinasi dengan BKPM Pusat dan dengan PTSP Kabupaten/Kota mengenai data potensi masing-masing Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
- Mengikuti kegiatan secara online Rapat/Kegiatan yang dilakukan oleh BKPM Pusat dan Instansi lainnya guna mengetahui perkembangan mengenai peta potensi dan kebijakan bidang investasi
- Terus berkoordinasi dengan staf dan atasan mengenai kegiatan yang dilaksanakan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Terbatasnya dana yang diberikan membuat terhambatnya koordinasi dengan pusat maupun daerah, manapun dalam mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan dipusat dan juga terhambatnya dalam membuat kajian potensi investasi
- Perangkat komputer yang sudah lama yang sudah tidak layak lagi untuk menerapkan aplikasi pemetaan potensi dari pusat

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Ditambahkannya anggaran dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi
- Penggantian perangkat computer yang lebih layak untuk pemetaan potensi daerah

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021:

- a) Evaluasi Pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal
- b) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
- c) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

2) Esselon IV (Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Fasilitasi Dunia Usaha dengan Perusahaan PM	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100,00%	Jumlah Kemitraaan Dunia Usaha	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

Indikator jumlah kemitraan dunia usaha yang terealisasi 4 kegiatan kemitraan yaitu

- Sri Eka Apriliana Pengarajin Sasirangan
- Yayuk marliana Makanan Ringan Labuana
- Hj Nazmi Atus Saadah UKM Sasirangan Pemilik Butik Melati
- Rusimah Pelaku Usaha Dodol Madu kasirat Raisa (Kandangan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kinerja esselon IV rata-rata capaian adalah 100.00% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 1 (satu) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Kemitraan dunia usaha	3 Kemitraan	4 Kemitraan	4 Kemitraan	4 Kemitraan 100,00%

Penjelasan :

- Indikator jumlah kemitraan dunia usaha ditargetkan tahun 2020 ditargetkan 2 kemitraan dan terealisasi 3 kemitraan, sehingga kinerja mencapai 150.00 % yaitu dengan Borneo Trip, Bakul emak dan Banuabisa.Com, sedangkan Tahun 2021 Sri Eka Apriliana Pengarajin Sasirangan, Yayuk marliana Makanan Ringan Labuana, Hj Nazmi Atus Saadah UKM Sasirangan Pemilik Butik Melati, Rusimah Pelaku Usaha Dodol Madu kasirat Raisa (Kandangan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
----	-------------------	-------------	------------------------------	-------------	------------------------------

1	Jumlah Kemitraan dunia usaha	2 Kemitraan	3 Kemitraan 150,00%	4 Kemitraan	4 Kemitraan 150,00%
---	------------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Penjelasan :

Indikator Jumlah Kemitraan dunia usaha pada tahun 2020 terealisasi **3 Kemitraan dengan capaian 150,00%**. Sedangkan tahun 2021 terealisasi **4 Kemitraan dengan capaian 100,00%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Telah melaksanakan fasilitasi dunia usaha terkait pelaksanaan kemitraan diantara pengusaha besar dengan UMKM
- Melaksanakan *Matchmaking* dan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang usaha mikro kecil menengah dan Peraturan presiden no 44 Tahun 2016

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Minimnya keterlibatan dari Kab/Kota tentang penerapan Peraturan pemerintah no 17 Tahun 2013
- Kabupaten/Kota kurang agresif dalam melaksanakan kemitraan karena mengaggap urusan UMKM bukan dari DPMPTSP Kab/Kota

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan supervisi dan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota tentang fasilitasi kemitraan dunia usaha
- Mendata perusahaan – perusahaan besar yang wajib bermitra dengan UKM/UMKM
- Melakukan monitoring/evaluasi baik tentang pelaksanaan kemitraan maupun pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi investasi di Kalimantan Selatan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

5. Esselon III (Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Calon Investor	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	33% (4-3)/3=1/3	110.00%	Pertumbuhaa Calon Investor = (Jumlah calon investor tahun beqjalan dikurang jumlah calon investor tahun lalu) dibagi jumlah calon investor tahun lalu x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25% (5/20)	100.00%	Promosi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah romosl an dilaksanakan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					105,00%		

Penjelasan :

- Indikator Persentase peningkatan Calon Investor yaitu target meningkat 33% dari tahun lalu
(=3 Calon Investor) sehingga kenaikan peningkatan calon investor

2020		2021	
Perusahaan	Sektor	Perusahaan	Sektor
- PT. Kingdom Investment Indonesia	Pelabuhan	- PT Global Pacific	Kereta Api
- PT. Kingdom Investment Indonesia	Kereta Api	- Sydney	Kusan Dam
- PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Waste Energy	- PT Xina	Pertambangan
- IIPC Sydney	Kusan DAM	- PT Infrastruktur Terbarukan Kusumat	PLTB

- Persentase Promosi yang ditindaklanjuti di targetkan 25% dari pelaksanaan promosi sampai dengan saat ini telah ditindaklanjuti 5 Promosi dari 5 kali yang telah dilaksanakan, sehingga capaian sampai dengan saat ini = $5/5 = 100\%$

Kawasan Industri Terpadu Mantuil
Pusat Distribusi Regional Kalimantan
Pusat Jantung dan Kanker Terpadu RSUD Ulin
Pusat Infeksi dan Saraf Terpadu RSUD Ansari Saleh
Peternakan Sapi Di Kabupaten Tanah Laut

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi	14.857.902.199.327	-	-	-
2.	Persentase Peningkatan Calon Investor	-	30%	33%	110%
3.	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	-	25%	25%	100%

Penjelasan :

Realisasi Rencana Investasi pada Tahun 2020 Indikator Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi ditargetkan Rp12.900.000.000.000 terealisasi persetujuan investasi sebesar **Rp14.857.902.199.327** sehingga kinerja mencapai **115.18%**, sedangkan tahun 2021 tidak ada target sehingga tidak ada terealisasi.

Persentase Peningkatan Calon pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi **33%** sehingga kinerja mencapai **110%**

Persentase Promosi yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi **25%** sehingga kinerja mencapai **100%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi	12.900.000.000.000	14.857.902.199.327 115,18%	-	-
2.	Persentase Peningkatan Calon Investor	-	-	30%	33% 110%
3	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	-	-	25%	25% 100%

Penjelasan :

Tahun 2020 Indikator Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi ditargetkan Rp12.900.000.000.000 terealisasi persetujuan investasi sebesar **Rp.14.857.902.199.327**, sehingga kinerja mencapai **115.18%**.

Tahun 2021 Persentase Peningkatan Calon Investor ditargetkan **30%** terealisasi **33%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Tahun 2021 Persentase Promosi yang ditindaklanjuti ditargetkan **25%** terealisasi **25%** sehingga kinerja mencapai **100%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pameran, media promosi investasi dan melaksanakan seminar bisnis, forum, one on one meeting
- Meningkatkan kapasitas potensi menjadi ready to offer
- Menyamakan persepsi Kab/Kota terhadap potensi yang potensial untuk dipromosikan dan juga menyamakan persepsi indikator potensi yang ready to offer

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- SDM yang memiliki kapabilitas memadai
- Pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM masih terbatas
- Alokasi anggaran yang masih terbatas

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan
- Peningkatan urusan alokasi anggaran

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

1) Esselon IV (Kasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Identifikasi Promosi Investasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali	100,00%	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, One on One Meeting	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 item	6 item	100,00%	Jumlah item Media Promosi	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

Indikator jumlah item media promosi investasi ditargetkan **6 item** terealisasi **6 item** sehingga kinerja mencapai **100%**, yaitu

- Brosur
- Baliho
- Informasi Potensi di Website
- Video
- Buku Potensi Investasi Kalimantan Selatan
- Booklet

Indikator Jumlah Item Media Promosi Investasi ditargetkan 3 Kali terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai 100%, yaitu

- Rapat Koordinasi Potensi Investasi Provinsi Kalimantan Selatan
- Forum Investasi
- One on One Meeting Investor dan UMKM

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item	6 Item	100%
2	Persentase Rekomendasi Hasil Rakor/Forum yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-
3.	Jumlah Calon Investor yang Berminat	4 investor	-	-	-
4.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	-	3 Kali	3 Kali	100%

Penjelasan :

Indikator Jumlah Item Media Promosi Investasi pada tahun 2020 ditargetkan 6 Item dan terealisasi **6 Item**, sehingga kinerja mencapai **100%**, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 6 Item dan terealisasi **6 Item**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu

2020	2020
- Brousur	- Brousur
- Informasi Potensi di website	- Informasi Potensi di website

- Baliho	- Baliho
- Buku	- Buku Potensi Investasi
- Video	Kalimantan Selatan
- Roll Banner	- Video
	- Booklet

Indikator Kedua yaitu Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting pada tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak ada realisasi. Sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan 3 Kali dan terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai 100% yaitu :

- Rapat Koordinasi Potensi Investasi Provinsi Kalimantan Selatan
- Forum Investasi
- One on One Meeting Investor dan UMKM

Kinerja Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal pada tahun 2021 dengan 2 (dua) indikator yang telah ditentukan memiliki capaian 100% dengan klasifikasi **sangat memuaskan**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item 100%	6 Item	6 Item 100%
2..	Jumlah Calon Investor yang berminat Investasi	4 Investor	4 Investor 100%	-	-
3.	Persentase Rekomendasi Hasil Rakor/Forum yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-
4.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	-	-	3 Kali	3 kali 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Jumlah Item Media Promosi Investasi pada tahun 2020 ditargetkan **6 Item** dan terealisasi **6 Item**, sehingga kinerja mencapai **100%**. Sedangkan tahun 2021 ditargetkan 6 Item dan terealisasi **6 Item**, sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator Kedua yaitu Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting pada tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak ada realisasi, Sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan 3 Kali dan terealisasi 3 kali sehingga kinerja mencapai 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan jumlah media promosi investasi
- Peningkatan pelaksanaan seminar bisnis, forum dan one on meeting

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya informasi dari Kabupaten/Kota sehingga menghambat kinerja untuk mengumpulkan data

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Menambah jumlah item media promосу investasi
- Menambah kegiatan seminar bisnis dan pelaksanaan promosi investasi

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

2) Esselon IV (Kasi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50% (10/10)	100,00%	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang Diminati Jumlah Potensi yang dipromosikan x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	5 Kali	166,67%	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Dinas PM dan PTSP

Rata-rata Capaian	107,29%		
-------------------	---------	--	--

Penjelasan :

Indikator jumlah pelaksanaan promosi investasi ditargetkan 3 kali terealisasi **5 kali** sehingga kinerja mencapai **166.67%** yaitu

No	Kegiatan
1	Zoom Meeting Diskusi menarik investor Australia ke Daerah melalui Penyiapan Materi Promosi Investasi yang tepat sasaran
2	Zoom Meeting Rapat Penjajakan Kerja Sama Sister Province dengan Provinsi Anhui (China)
3	Pameran Jiattex Oexpo
4	Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2021
5	Door To Door Promosi : • PT Jhonlin Group • PT Adaro Indonesia

Indikator kedua Persentase Potensi investasi daerah yang diminati pada tahun 2021 ditargetkan 50% dan terealisasi 50% sehingga kinerja mencapai **100.00%** yaitu :

No	Potensi Investasi Daerah
1	Sapi Potong
2	Kawasan Industri Batulicin
3	Kawasan industri Jorong
4	Aerocity Syamsuddin Noor
5	Bendungan Kusan
6	Riam Kanan
7	Floating Market
8	Geopark
9.	Loksado
10.	Waste to Energy

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 107.29% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021
----	-------------------	------	------

		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah Promosi jenis potensi investasi daerah yang diminati	8 Potensi	-	-	-
2.	Jumlah pelaksanaan promosi investasi	8 Kali	3 Kali	5 Kali	166.67%
3	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	-	50%	50%	100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu tahun 2020 ditargetkan **5 potensi** realisasi **8 potensi** sehingga kinerja mencapai **160.00%**, sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu

Tahun 2020	
No	Potensi Investasi Daerah
1	Sapi Bali di Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tabalong
2	Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
3	AERO City di Kota Banjarbaru
4	Cabe Hiyung di Kabupaten Tapin
5	Bawang Merah di Kabupaten Tapin
6	Bendungan Pitab di Kabupaten Tapin
7	Waste Energy di Kota Banjarmasin
8	Bendungan Kusan Hilir di Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator kedua jumlah pelaksanaan promosi investasu tahun 2020 tidak ditargetkan **5 kali** realisasi **8 kali** sehingga kinerja mencapai **160.00%**, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **3 kali** realisasi **5 kali** sehingga kinerja mencapai **166.67%**,

Tahun 2020

No	Kegiatan	Tanggal
1	Zoom Meeting Koordinasi Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Investasi oleh IIPC Sydney bersama DPMPTSP Kalsel	27 Juli 2020
2	Zoom Meeting DPMPTSP Banjarmasin x PT PII x IIPC Sydney	24 September 2020
3	Zoom Meeting DPMPTSP Banjarmasin x PT PII x IIPC Sydney	6 Oktober 2020
4	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Selatan (Industri Smelter Kotabaru) di Novotel Banjarmasin Airport	26 Oktober 2020
5	Rapat Koordinasi & Zoom Meeting Penyusunan Peta Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Selatan (Industri Smelter Tanah Bumbu) di Novotel Banjarmasin Airport	26 Oktober 2020
6.	Zoom Meeting DPMPTSP Banjarmasin x IIPC Sydney Pembahasan Minat Investasi pada Proyek Kusan Dam di Kalimantan Selatan	05 Nopember 2020
7.	Zoom Meeting Capacity Building Fungsi Hubungan Investor	10 Nopember 2020
8.	Zoom Meeting DPMPTSP Prov Kalsel x PT Sucofindo Persero FGD Dengan Stakelohder Terkait Untuk Kebutuhan Penyusunan Peta Peluang Investasi Di Sektor Industri Smelter Tanah Bumbu	26 November 2020

Tahun 2021	
No	Kegiatan
1	Zoom Meeting Diskusi menarik investor Australia ke Daerah melalui Penyiapan Materi Promosi Investasi yang tepat sasaran
2	Zoom Meeting Rapat Penjajakan Kerja Sama Sister Province dengan Provinsi Anhui (China)
3	Pameran Jiattex Oexpo
4	Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2021
5	Door To Door Promosi : • PT Jhonlin Group • PT Adaro Indonesia

Kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal pada tahun 2021 dengan 2 (dua) indikator yang telah ditentukan memiliki capaian **107.29%** dengan klasifikasi **sangat memuaskan**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Jumlah Promosi jenis potensi investasi daerah yang diminati	5 Potensi	5 Potensi 160.00%	-	-
2.	Jumlah pelaksanaan promosi investasi	5 Kali	5 Kali 160.00%	3 Kali	5 Kali 166.67%
3.	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	-	-	50%	50% 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Jumlah Promosi jenis potensi investasi daerah yang diminati pada tahun 2020 ditargetkan 5 Potensi teralisasi 5 Potensi dengan capaian 100.00%, sedangkan tahun 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak ada terealisasi

Indikator Kedua yaitu Jumlah pelaksanaan promosi investasi pada tahun 2020 terealisasi 5 Potensi dengan capaian 100.00%, sedangkan pada tahun 2021 terealisasi 3 Kali dengan capaian 100.00%,

Indikato ketiga yaitu Persentase Potensi investasi daerah yang diminati pada tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak ada terealisasi, sedangkan pada tahun 2021 terealisasi 50% dengan capaian 100.00%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Mengikuti pameran online maupun offline
- Zoom door to door promosi investasi maupun dating langsung
- Forum Investasi

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan promosi investasi masih kurang banyak

3.3 Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan promosi investasi agar ditambah kegiatannya agar bias menarik calon investor baik dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan terhadap kegiatan tersebut. Berikut adalah analisis terkait penunjang keberhasilan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, yakni:

a) Pelaksanaan kegiatan Promosi penanaman Modal Kewenangan Provinsi

6. Esselon III (Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perusahaan yang aktif (diawasi/diamati/diketahui) dibagi jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang ada di Kalsel x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	30,00%	32,40%	108,00%	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai target	50.00%	46.15%	92.31%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Investasi Provinsi dibagi 13 Memenuhi Target Kabupaten/Kota x 100%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,10%		

Penjelasan :

- 1) Indikator persentase permasalahan perusahaan yang terselesaikan adalah sebesar 100% yaitu 43 Perusahaan yang terdata dan yang telah diselesaikan, berdasarkan data pers rilis yang bersumber dari lkpmonline.go.id
- 2) Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya yaitu hingga bulan ini 324 perusahaan dari 300 (32.40%), berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara tatap muka/online
- 3) Persentase kabupaten/Kota yang mencapai target yaitu yang mencapai target Tahun 2021 46.19 % :
 - Kabupaten Tabalong
 - Kabupaten Banjar
 - Kota Banjarmasin
 - Kabupaten Tanah Bumbu
 - Kabupaten Tapin
 - Kabupaten Kotabaru

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 100,10% dengan klarifikasi **Sangat Memuaskan**, dengan 3 (dua) indikator

- 1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100.00%	100%	100.00%	100.00%
2.	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	25.76%	30%	32.40%	108.00%
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	-	50%	46.15%	92.31%

Penjelasan :

Indikator Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 50% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **200,00%**, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **100%** dan teralisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya pada tahun 2020 ditargetkan **24%** dan terealisasi **25.76%** sehingga kinerja mencapai **107.33%**. sedangkan tahun 2020 ditargetkan **30%** dan terealisasi **32.40%** sehingga kinerja mencapai **108.00%**

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **50%** dan terealisasi **46.15%** sehingga kinerja mencapai **92.31%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	50%	100.00% 200,00%	100%	100.00% 100,00%
2	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	24%	25.76% 107.33%	30%	32.40% 108.00%
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	-	-	50%	46.15% 92.31%

Penjelasan :

Indikator Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 50% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **200,00%**, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **100%** dan teralisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya pada tahun 2020 ditargetkan **24%** dan terealisasi **25.76%** sehingga kinerja mencapai **107.33%**. sedangkan tahun 2020 ditargetkan **30%** dan terealisasi **32.40%** sehingga kinerja mencapai **108.00%**

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **50%** dan terealisasi **46.15%** sehingga kinerja mencapai **92.31%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Membagi PIC untuk Kab/Kota dalam mengkoordinasi target investasi , perusahaan-perusahaan dan pelatihan LKPM
- Mengirimkan email sebagai pengingat/reminder penyampaian LKPM per triwulan
- Melakukan pembinaan/pelatihan LKPM kepada perusahaan melalui telepon/WA
- Melakukan fasilitasi permasalahan perusahaan melalui zoom meeting

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPSTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan PIC dimasing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2022
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Prov Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek implementasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021:

1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

7. Esselon IV (Kasi Pengawasan Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pengawasan PM	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	324 Perusahaan	108,00%	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal PMA dan PMDN yang melaksanakan kegiatannya sesuai target Perusahaan	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					104,00%		

Penjelasan :

- 1) Indikator jumlah perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan) ditargetkan 300 Perusahaan terealisasi 324 Perusahaan dengan capaian 108.00%
- 2) Laporan Realisasi Penanaman Modal ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100% yaitu adanya dokumen realisasi Invenstasi penanaman Modal PMA dan PMDN Tahun 2021

Kinerja esselon IV rata-rata capaian adalah 104.00% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	312 Perusahaan	300 Perusahaan	324 Perusahaan	108.00%
2.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Penjelasan :

jumlah perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan) tahun 2020 ditargetkan **300 perusahaan** dan terealisasi **312 perusahaan** dengan capaian **104.00%**. sedangkan tahun 2021 ditargetkan **300 perusahaan** dan terealisasi **324 perusahaan** dengan capaian **108.00%**.

Laporan Realisasi Penanaman Modal pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **1 Dokumen** dan terealisasi **1 Dokumen** dengan capaian **100.00%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	312 Perusahaan 104.00%	300 Perusahaan	324 Perusahaan 108.00%
2.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen 100%

Penjelasan :

Indikator Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan) pada tahun 2020 terealisasi

312 Perusahaan dengan capaian 104.00%.sedangkan tahun 2021 terealisasi **324 Perusahaan dengan capaian 108.00%**.

Laporan Realisasi penanaman modal pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu .sedangkan tahun 2021 terealisasi **1 Dokumen dengan capaian 100.00%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan penanaman modal
- Mengirimkan email blast ke perusahaan untuk menyampaikan LKPM per triwulan
- Melakukan koordinasi melalui telepon/wa jika perusahaan mempunyai kendala didalam pelaporan LKPM nya

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Adanya pandemic covid gelombang ke 2 pada awal tahun mengakibatkan kesulitan untuk melakukan kunjungan (perusahaan menolak untuk dikunjungi jika tidak ada hasil test antigen)
- Perubahan sistem dari OSS 1.1 ke OSS RBA mengakibatkan kesulitan untuk mendata rencana investasi perusahaan baru
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target realisasi investasi yang diberikan
- Koordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota mengalami kendala karena adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPTSP Kab/Kota

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan Koordinasi dengan PIC di DPMPTSP Kab/Kota terkait realisasi investasi untuk TA 2022
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk mendata rencana investasi perusahaan penanaman modal

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

b) Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

8. Esselon IV (Kasi Pembinaan Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pembinaan PM	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan	408 Perusahaan	102,00%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementa sikan Kebijakan Penanaman Modal Terbaru dibagi 13 (Kabupaten/Kota) x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					101,00%		

Penjelasan :

Indikator jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu ditargetkan 400 perusahaan dengan capaian 102.00% yaitu data perusahaan dari LKPM yang masuk..

Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru ditargetkan 100% dengan capaian 100% yaitu 13 Kabupaten/Kota telah mengimplementasikan Perka BKPM nomor 05 Tahun 2021

Kinerja esselon IV rata-rata capaian adalah 101.00% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	419 Perusahaan	400 Perusahaan	408 Perusahaan	102.00%
2.	Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

Indikator jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu pada tahun 2020 ditargetkan 400 perusahaan dan terealisasi **419 perusahaan**, sehingga kinerja mencapai **104.00%**. sedangkan tahun 2021 ditargetkan 400 perusahaan dan terealisasi **408 perusahaan**, sehingga kinerja mencapai **102.00%**.

Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan Tahun 2021 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga **kinerja mencapai 100%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019 dan % capaian	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian
1	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan	419 Perusahaan 104.00%	400 Perusahaan	408 Perusahaan 102.00%
2.	Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	-	100%	100%	100% 100%

Penjelasan :

Indikator jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu pada tahun 2020 ditargetkan 400 perusahaan dan terealisasi **419 perusahaan**, sehingga kinerja mencapai **104.00%**. sedangkan tahun

2021 ditargetkan 400 perusahaan dan terealisasi **408 perusahaan**, sehingga kinerja mencapai **102.00%**.

Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan Tahun 2021 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100% sehingga kinerja mencapai 100%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan Bimtek LKPM online yang dilaksanakan pada tanggal 25 maret 2021 di Hotel NASA Banjarmasin, tanggal 3 Juni 2021 di Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin, dan tanggal 6 Oktober 2021 di Hotel Banjarmasin Internasional
- Sosialisasi kemitraan Berusaha pada tanggal 30 Maret 2021 di Hotel NASA Banjarmasin dan tanggal 10 Juni 2021 di Hotel Banjarmasin Internasional Banjarmasin
- Sosialisasi Kebijakan penanaman modal yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2021 Hotel NASA Banjarmasin dan tanggal 17 Juni 2021 di Hotel Novotel Banjarbaru
- Bimtek OSS RBA dilaksanakan pada tanggal 24-25 Maret 2021 di Hotel NASA Banjarmasin
- Melaksanakan FGD Fasilitasi permasalahan perusahaan di Kabupaten Tanah Laut tanggal 29 Nopember 2021

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Kurang maksimalnya Kabupaten dalam usaha pencapaian target realisasi investasi sesuai target investasi daerah masing-masing , masih bergantung kepada provinsi
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan yang menyampaikan LKPM
- Dengan keterbatasan anggaran (mulai april 2020) anggaran Seksi Pembinaan dialihkan untuk penanganan covid 19, sehingga upaya untuk tatap muka dengan perusahaan tidak bisa dilakukan untuk pembinaan LKPM nya Cuma melalui video call wa sehingga tidak berjalan maksimal

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama SATGAS percepatan pelaksanaan perusahaan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 0161 Tahun 2017 untuk mencari solusi permasalahan bagi investor agar meralisasikan investasinya sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan tercapainya target realisasi investasi tahun 2022
- Melaksanakan Bimteks Implementasi OSS RBA dan Bimtek Implementasi pengawasan yang didalamnya termuat LKPM online dan kewajiban bermitra dengan UMKM

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal

9. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan infrastruktur dan Sosial)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	B (85)	A (90.75)	106,76%	Nilai IKM Bidang Infrastruktur dan Sosial	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Permohonan yang dilayani	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Persentase Usaha Berizin	90%	99.19	110.21%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
Rata-rata Capaian					105,66%		

Penjelasan :

- a. Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan infrastruktur dan sosial dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial sebanyak 93 responden yaitu dengan nilai IKM 90.75 kategori (sangat baik) sebanyak 115 Responden
- b. Indikator persentase permohonan yang dilayani yaitu pelayanan perizinan bidang infrastruktur dan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 170 berkas dan dilaksanakan sejumlah 170 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 105,66% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (89,84)	B (85)	A (90.75)	106,70%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP	100%	-	-	-
3.	Persentase Permohonan yang dilayani	-	100%	100%	100%
4.	Persentase Usaha Berizin	-	90%	99.19%	110.21%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial tahun 2020 ditargetkan B dengan nilai 85 dan terealisasi **A dengan**

nilai 89,44 sehingga kinerja mencapai 105,69% dari 93 responden, sedangkan tahun 2021 ditargetkan B dengan nilai 85 dan terealisasi **A dengan nilai 90,75** sehingga kinerja mencapai 106,70% dari 115 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP Tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 257 berkas dan dilaksanakan sejumlah 257 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu.

Persentase Permohonan yang dilayani tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% yaitu Pemenuhan permohonan yang dilayani sebanyak 170 dan diproses sebanyak 170 Total berkas masuk sebanyak 170 dan yang dilayani sebanyak 170 (100%)

Persentase Usaha Berizin tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 terealisasi 99.19% dengan capaian 110.21% terdiri dari 10.823 izin dari 10.911 usaha.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	B (85)	A (89.84) 105,69%	B (85)	A (90.75) 106,76%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP	100%	100% 100%	-	-
3.	Persentase Permohonan yang dilayani	-	-	100%	100% 100%
4.	Persentase Usaha Berizin	-	-	90%	99.19 110.21%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial tahun 2020 ditargetkan B dengan nilai 85 dan terealisasi **A dengan nilai 89,44** sehingga kinerja mencapai 105,69% dari 93 responden, sedangkan tahun 2021 ditargetkan B dengan nilai 85 dan terealisasi **A dengan nilai 90,75** sehingga kinerja mencapai 106,70% dari 115 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP Tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 257 berkas dan dilaksanakan sejumlah 257 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu.

Persentase Permohonan yang dilayani tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% yaitu Pemenuhan permohonan yang dilayani sebanyak 170 dan diproses sebanyak 170 Total berkas masuk sebanyak 170 dan yang dilayani sebanyak 170 (100%)

Persentase Usaha Berizin tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 terealisasi 99.19% dengan capaian 110.21% terdiri dari 10.823 izin dari 10.911 usaha.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang perizinan infrastruktur dan social sesuai ketentuan
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi
- Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Instansi teknis terkait

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Perizinan yang melalui OSS masih proses penyempurnaan
- SDM OPD teknis/mitra kerja kurang memahami OSS RBA

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengikuti TOT dan Sosialisasi untuk penyempurnaan OSS RBA menunggu pusat sambil berjalan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yakni: Program Pelayanan penanaman Modal kegiatan .

a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

10. Esselon IV (Kasi Perizinan Sosial)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Perizinan Bidang Sosial	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian						100,00%	

Penjelasan :

Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 190 berkas dan dilaksanakan sejumlah 190 berkas sehingga terealisasi capaian 100%. Yaitu :

- Dokumen permohonan bidang kesehatan sebanyak 19 dan diproses sebanyak 19
- Dokumen permohonan bidang sosial sebanyak 29 dan diproses sebanyak 29
- Dokumen permohonan bidang pendidikan sebanyak 3 dan diproses sebanyak 3
- Dokumen permohonan bidang penelitian sebanyak 35 dan diproses sebanyak 35
- Dokumen permohonan bidang Tenga Kerja sebanyak 4 dan diproses sebanyak 4

Total Berkasi masuk sebanyak 190 dan diproses 190 (100%)

Indikator jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan bidang sosial yang dilayani sebanyak 20 Jenis Izin

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses	100%	-	-	-
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang Dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin	100%
3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan	-	100%	100%	100%

	Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan				
--	--	--	--	--	--

Penjelasan :

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 92 berkas dan dilaksanakan sejumlah 92 berkas., sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu.

Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang Dilayani tahun 2020 ditargetkan 20 jenis izin dan terealisasi 20 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%., sedangkan tahun 2021 ditargetkan 20 jenis izin dan terealisasi 20 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%.

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 90 berkas dan dilaksanakan sejumlah 90 berkas.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses	100%	100% 100%	-	-
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang Dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin 100%	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin 100%

3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	-	-	100%	100% 100%
----	--	---	---	------	--------------

Penjelasan :

Persentase Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses yang dapat diproses pada tahun 2021 terealisasi 100%.

Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang Dilayani terealisasi 20 jenis izin (100%)

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan Total berkas masuk sebanyak 90 dan diproses sebanyak 90 (100%)

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang perizinan infrastruktur dan social sesuai ketentuan
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi
- Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Instansi teknis terkait

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Perizinan yang melalui OSS masih proses penyempurnaan
- SDM OPD teknis/mitra kerja kurang memahami OSS RBA

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengikuti TOT dan Sosialisasi untuk penyempurnaan OSS RBA menunggu pusat sambil berjalan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas,

tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pentapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

11. Esselon IV (Kasi Perizinan Infrastruktur)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang Dilayani	35 Jenis Izin	35 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Infrastruktur yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian						100,00%	

Penjelasan

Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan yaitu pelayanan perizinan bidang infrastruktur yang telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 80 berkas dan dilaksanakan sejumlah 80 berkas sehingga terealisasi capaian 100%. Yaitu :

- Dokumen permohonan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) sebanyak 32 dan diproses sebanyak 32
- Dokumen permohonan bidang perhubungan sebanyak 48 dan diproses sebanyak 48

Total Berkas masuk sebanyak 80 dan diproses 80 (100%)

Indikator jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan bidang sosial yang dilayani sebanyak 35 Jenis Izin

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	-	-	-
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang Dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin	100%
3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 165 berkas

dan dilaksanakan sejumlah 165 berkas. Sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu

Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang Dilayani tahun 2020 ditargetkan 35 jenis izin dan terealisasi 35 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%. Sedangkan tahun 2021 ditargetkan 35 jenis izin dan terealisasi 35 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%.

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 80 berkas dan dilaksanakan sejumlah 80 berkas

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	100% 100%	-	-
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang Dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin 100%	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin 100%
3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	-	-	100%	100% 100%

Penjelasan :

Persentase Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses yang dapat diproses pada tahun 2021 terealisasi 100%.

Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang Dilayani terealisasi 35 jenis izin (100%)

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan Total berkas masuk sebanyak 80 dan diproses sebanyak 80 (100%)

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang perizinan infrastruktur dan social sesuai ketentuan
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi
- Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Instansi teknis terkait

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Perizinan yang melalui OSS masih proses penyempurnaan
- SDM OPD teknis/mitra kerja kurang memahami OSS RBA

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengikuti TOT dan Sosialisasi untuk penyempurnaan OSS RBA menunggu pusat sambil berjalan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 yakni:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pentapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

12. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	B (85)	A (88,00)	103,53%	Nilai IKM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Usaha Berizin	90%	99.88%	110.98	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					104,84%		

Penjelasan

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Ekonomi dan Sumber daya alam dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang Produksi dan Industri sebanyak 143 responden yaitu dengan nilai IKM 88.00 kategori (sangat baik)
- Indikator Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani yaitu pelayanan perizinan bidang Ekonomi dan sumber daya alam telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 1.057 berkas dan dilaksanakan sejumlah 1.057 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 104,84% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	B (87,88)	B (85)	A (88,00)	103,53%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP	100%	-	-	-
3.	Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	-	100%	100%	100%
4.	Persentase Usaha Berizin	-	90%	99.88%	110.98%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya tahun 2020 ditargetkan B dengan nilai 85 dan terealisasi B dengan nilai 87,88 sehingga kinerja mencapai 103,39% yaitu sebanyak 327 responden. Sedangkan tahun 2021 ditargetkan B dengan nilai 85 dan terealisasi A dengan nilai 88,00 sehingga kinerja mencapai 103,53% yaitu sebanyak 143 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP Tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 1.294 berkas dan dilaksanakan sejumlah 1.294 berkas sehingga terealisasi capaian 100%

Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 1.057

berkas dan dilaksanakan sejumlah 1.057 berkas sehingga terealisasi capaian 100%

Persentase usaha berizin ditargetkan 90% dan terealisasi **99.88%**, yaitu dimana izin terbit dibagi jumlah permohonan (usaha yang ada) terdiri dari 13.265 izin dari 13.281 usaha sehingga terealisasi capaian 110.98%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	B (85)	A (89.84) 105,69%	B (85)	A (88.84) 103,53%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	-	-	100%	100% 100%
4.	Persentase Usaha Berizin	-	-	90%	99.88% 110.98%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam pada tahun 2020 terealisasi dengan nilai **A sangat baik 89.84** dengan capaian **105.89%**, sedangkan tahun 2021 terealisasi dengan nilai **A sangat baik 88.00** dengan capaian **103.53%**,

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP Tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 1.176 berkas dan dilaksanakan sejumlah 1.176 berkas

sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu.

Persentase Permohonan yang dilayani tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% yaitu Pemenuhan permohonan yang dilayani sebanyak 1.057 dan diproses sebanyak 1.057 Total berkas masuk sebanyak 1.057 dan yang dilayani sebanyak 1.057 (100%)

Persentase Usaha Berizin tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 terealisasi 99.88% dengan capaian 110.98% terdiri dari 13.265 izin dari 13.281 usaha.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Pelaksanaan gerai perizinan
- Peninjauan Lapangan
- Koordinasi yang intens dengan Tim teknis
- Konsultasi dan konsolidasi ke Kementerian Pusat di Jakarta

3.2 Hambatan dan Pencapaian Kinerja

- Banyak pelaku usaha / pemohon ijin yang belum paham tentang OSS RBA
- Kurangnya sosialisasi tentang OSS RBA
- OSS RBA terus berkembang baik itu fitur maupun menu-menunya
- Jaringan yang tidak mendukung
- SDM yang belum ada bekal ilmu yang cukup tentang OSS RBA
- DPMPTSP, Tim Teknis juga masih tahap belajar / mempelajari system OSS RBA
- Masih banyak aplikasi diluar OSS yang dipakai contoh : Dinas perindustrian Aplikasi SINAS, Dinas Kelautan dan Perikanan Aplikasi SIMKADA, BPN Prov Kalsel aplikasi GISTARU
- Adanya dinas teknis tidak tahu adanya kewenangan Provinsi
- Ada beberapa Dinas teknis yang belum mempunyai SOP

3.3 Rencana Tindak lanjut

- Adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke daerah tentang OSS RBA
- SDM yang tersedia sudah paham tentang OSS RBA
- Adanya sosialisasi tentang OSS RBA ke pelaku usaha /pemohon lain

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2021, yakni: Program Pelayanan Penanaman Modal dan kegiatan :

a) Penanaman Modal yang MENURUT Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

13. Esselon IV (Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dilayani	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

Persentase Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar pelayanan yaitu pelayanan perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa

ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 190 berkas dan dilaksanakan sejumlah 190 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

- Dokumen permohonan bidang kehutanan sebanyak 43 dan diproses sebanyak 43
- Dokumen permohonan bidang energi dan sumber daya mineral sebanyak 134 dan diproses sebanyak 134
- Dokumen permohonan bidang lingkungan sebanyak 13 dan diproses sebanyak 13

Total Berkas masuk sebanyak 190 dan diproses 190 (100%)

Indikator Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Dilayani tahun 2020 ditargetkan 40 jenis izin dan terealisasi 40 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%., sedangkan tahun 2021 ditargetkan 40 jenis izin dan terealisasi 40 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses	100%	-	-	-
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin	100%

	Sumber Daya Alam yang Dilayani				
3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan sumber Daya alam yang dapat diproses tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 190 berkas dan dilaksanakan sejumlah 190 berkas., sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu.

Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan sumber Daya alam yang Dilayani tahun tahun 2020 ditargetkan 40 jenis izin dan terealisasi 40 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%., sedangkan tahun 2021 ditargetkan 40 jenis izin dan terealisasi 40 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%.

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan sumber Daya alam yang dapat diproses sesuai standar pelayanan pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 190 berkas dan dilaksanakan sejumlah 190 berkas.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang dapat diproses	100%	100% 100%	-	-
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang Dilayani	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin 100%	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin 100%
3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	-	-	100%	100% 100%

Penjelasan :

Persentase Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam yang dapat diproses yang dapat diproses pada tahun 2021 terealisasi 100%.

Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam yang Dilayani terealisasi 40 jenis izin (100%)

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam yang

dapat diproses sesuai standar pelayanan Total berkas masuk sebanyak 190 dan diproses sebanyak 190 (100%)

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

Berkordinasi dengan Dinas teknis terkait mengenai regulasi persyaratan perizinan

3.2 Hambatan dan Pencapaian Kinerja

Tidak ada kegiatan Rapat koordinasi dengan Dinas teknis, sehingga koordinasi kurang maksimal

3.3 Rencana Tindak lanjut

Adanya penganggaran kegiatan Rapat Koordinasi per sector izin agar koordinasi lebih efektif dan menghadirkan narasumber pusat

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021, yakni:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pentapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

14. Esselon IV (Kasi Perizinan Ekonomi)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar Pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang Dilayani	50 Jenis Izin	50 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Ekonomi yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian						100,00%	

Penjelasan :

Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses yaitu pelayanan perizinan Bidang Ekonomi yang telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 867 berkas dan dilaksanakan sejumlah 867 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

- Dokumen permohonan bidang kelautan dan perikanan sebanyak 600 dan diproses sebanyak 600
- Dokumen permohonan bidang pariwisata sebanyak 4 dan diproses sebanyak 4
- Dokumen permohonan bidang pertanian sektor peternakan sebanyak 257 dan diproses sebanyak 257
- Dokumen permohonan bidang pertanian sektor perkebunan sebanyak 2 dan diproses sebanyak 2
- Dokumen permohonan bidang koperasi sebanyak 2 dan diproses sebanyak 2
- Dokumen permohonan bidang perindustrian sebanyak 2 dan diproses sebanyak 2

Total Berkas masuk sebanyak 867 dan diproses 867 (100%)

Indikator Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang Dilayani terealisasi 50 jenis izin (100%)

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 2 (dua) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan)	100%	-	-	-

	Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses				
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang Dilayani	50 Jenis Izin	50 Jenis Izin	50 Jenis Izin	100%
3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 867 berkas dan dilaksanakan sejumlah 867 berkas., sedangkan tahun 2021 tidak ada target pada tahun itu.

Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang Dilayani tahun 2020 ditargetkan 50 jenis izin dan terealisasi 50 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%., sedangkan tahun 2021 ditargetkan 50 jenis izin dan terealisasi 50 jenis izin sehingga kinerja mencapai 100%.

Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar pelayanan pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%** yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada

penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 90 berkas dan dilaksanakan sejumlah 90 berkas.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses	100%	100% 100%	-	-
2.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang Dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin 100%	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin 100%
3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	-	-	100%	100% 100%

Penjelasan :

Indikator Persentase Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses yang dapat diproses pada tahun 2020 terealisasi 100%.

Indikator Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang Dilayani terealisasi 50 jenis izin (100%)

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Pelaksanaan gerai perizinan
- Peninjauan Lapangan
- Koordinasi yang intens dengan Tim teknis
- Konsultasi dan konsolidasi ke Kementerian Pusat di Jakarta

3.2 Hambatan dan Pencapaian Kinerja

- Perizinan dengan system OSS RBA masih dalam tahap penyempurnaan-penyempurnaan sehingga banyak pemohon ijin/ pelaku usaha, yang belum paham alur maupun prosesnya dalam mengajukan ijin
- DPMPTSP, Tim Teknis juga masih tahap belajar / mempelajari system OSS RBA

3.3 Rencana Tindak lanjut

- Adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke daerah tentang OSS RBA
- SDM yang tersedia sudah paham tentang OSS RBA
- Adanya sosialisasi tentang OSS RBA ke pelaku usaha /pemohon lain

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021,

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pentapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

15. Esselon III (Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	B (85)	B (86,75)	102,06%	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Rata-rata Capaian					102,06%		

Penjelasan :

- a. Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov

Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebanyak 54 responden yaitu dengan nilai IKM 86,75 kategori (baik)

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 102.06% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 1 (satu) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (91,25)	B (85)	B (86,75)	102,06%

Penjelasan :

Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPSTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebanyak 54 responden yaitu dengan nilai IKM 86.75 kategori baik)

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	B (82.50)	A (89,56) 108,56%	B (85)	B (86,75) 102,06%

Penjelasan :

Nilai IKM Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan pada tahun 2020 terealisasi **B dengan nilai 89,56 dan capaian 108,56%**. , sedangkan tahun 2021 **dengan nilai 86,75 dan capaian 102,06%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparan, professional, terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Sarana dan prasarana dan SDM

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengadakan forum fasilitasi perusahaan
- Mengadakan forum konsultasi publik
- Melakukan pendampingan terhadap masyarakat/pihak terkait dalam penyelenggaraan pemohon terpadu perizinan dan non perizinan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a) Penanaman modal yang menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan Menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- b) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi

16. Esselon IV (Kasi Kebijakan, Hukum dan Layanan Pengaduan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100%	100%	Jumlah Pelayanan Investor dibagi Jumlah Permintaan Calon Investor x 100 %	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	Jumlah Pemenuhan Layanan Konsultasi dibagi Jumlah Konsultasi (dari Masyarakat/Pemohon Ijin) x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu 53 pengaduan dari :

- Whatssup Pengaduan (51)

- Email (2)

Persentase Pemenuhan pelayanan Investor :

- PT Pancar Karya Persada di Kabupaten Tabalong:
- PT Jaya Mandiri Sukses di Kabupaten Kotabaru
- PT Jala Trans Sinergi Kabupaten Tanah Bumbu

Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi

- Tatap Muka (72)
- Chat Box (23)

Total Jumlah Konsultasi Yang Masuk sebanyak 93 dan dilayani sebanyak 93 (100%)

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 3 (tiga) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Pengaduan diselesaikan	100%	-	-	-
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	-	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

Indikator Persentase pengaduan diselesaikan tahun 2020 terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2021 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi 100% dengan capaian 100%,

Persentase pemenuhan pelayanan investor tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi 100% dengan capaian 100%,

Persentase pemenuhan pelayanan konsultasi tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi 100% dengan capaian 100%,

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Persentase Pengaduan diselesaikan	100%	100% 100%	-	-
2.	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100% 100%
3.	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	-	-	100%	100% 100%
4.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	-	-	100%	100% 100%

Penjelasan :

Indikator Persentase pengaduan diselesaikan tahun 2020 terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2021 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi 100% dengan capaian 100%,

Persentase pemenuhan pelayanan investor tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi 100% dengan capaian 100%,

Persentase pemenuhan pelayanan konsultasi tahun 2020 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 terealisasi 100% dengan capaian 100%,

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

Memfasilitasi pelayanan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya fasilitas dan SDM yang memadai
- Pengaduan terhadap keterlambatan pada proses penerbitan izin dikarenakan adanya keterlambatan dari teknis terkait untuk mengeluarkan surat pertimbangan teknis atau berita acara pemeriksaan

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengadakan forum fasilitasi perusahaan
- Mengadakan forum konsultasi publik
- Melakukan *helpdesk* / pendampingan terhadap masyarakat atau pemohon dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

- a) Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- b) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
- c) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

17. Esselon IV (Kasi Data dan Informasi)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	2 Sistem	2 Sistem	100,00%	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update (terbaru)	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update 2 sistem yaitu

- SIMAPAN
- Website

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 1 (satu) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Non Perizinan	100%	-	-	-
2.	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	-	2 Sistem	2 Sistem	100%

Penjelasan :

Indikator Persentase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Non Perizinan tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 teralisasi 100% dengan capaian 100%.

Jumlah sistem informasi berjalan dengan lancar dan data informasi yang update tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan 2021 eralisasi 100% dengan capaian 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020 dan % capaian	Target 2021	Realisasi 2021 dan % capaian
1	Persentase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Non Perizinan	100%	100% 100%	100%	100% 100%
2	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	-	-	2 Sistem	2 Sistem 100%

Penjelasan :

Indikator Persentase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Non Perizinan tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2021 teralisasi 100% dengan capaian 100%.

Jumlah sistem informasi berjalan dengan lancar dan data informasi yang update tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan 2021 eralisasi 100% dengan capaian 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Memberdayakan sarana dan prasarana yang ada, SDM yang terbatas serta jaringan supaya SIMAPAN dan website dapat berjalan untuk menunjang kegiatan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Sarana dan prasarana yang terbatas , computer tidak sesuai spesifikasi standar, masih kurang pelatihan terhadap SDM terutama menyangkut sistem, server dan jaringan

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengusulkan supaya mengikti pelatihan sistem, server dan jaringan, pertukaran pengetahuan teknologi informasi terutama dengan Jawa barat, merencanakan pelaksanaan pemindahan server DPMPTSP dari Jawa barat ke Kalsel, melakukan updating SIMAPAN berupa tandatangan digital jika terjadi pergantian pimpinan dan update website berupa aplikasi e-office

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 :

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data Informasi perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

A. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

Laporan Konsolidasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2021

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						Satuan unit
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.928.943.442	77.65	100	99.21	100	87.2	11.928.943.442	10.402.611.246	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.307.800	1.22	100	100	100	89.23	187.307.800	167.127.600	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	3 Dokumen	139.165.800	0.91	100	100	100	85.94	139.165.800	119.599.400	3 Dokumen
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	3 Dokumen	48.142.000	0.31	100	100	100	98.73	48.142.000	47.528.200	3 Dokumen
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.381.194.800	48.05	100	100	100	85.8	7.381.194.800	6.333.070.796	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	7.138.625.000	46.47	100	100	100	85.55	7.138.625.000	6.107.317.396	12 Bulan
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	229.199.800	1.49	100	100	100	93.08	229.199.800	213.339.000	12 Bulan
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan dan Akutansi	1 Dokumen	13.370.000	0.09	100	100	100	92.85	13.370.000	12.414.400	1 Dokumen
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			56.557.000	0.37	100	100	100	64.35	56.557.000	36.390.800	
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	20 Orang	35.143.000	0.23	100	100	100	53.87	35.143.000	18.930.800	20 Orang
X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	21.414.000	0.14	100	100	100	81.54	21.414.000	17.460.000	100 Orang

X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.257.052.200	8.18	100	100	100	80.35	1.257.052.200	1.010.109.050	
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	36.597.000	0.24	100	100	100	83.26	36.597.000	30.471.300	12 Bulan
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	66.983.900	0.44	100	100	100	99.34	66.983.900	66.543.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan	317.332.800	2.07	100	100	100	95.3	317.332.800	302.425.500	12 Bulan
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45.998.500	0.3	100	100	100	99.78	45.998.500	45.899.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	139.700.000	0.91	100	100	100	96.08	139.700.000	134.220.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	650.440.000	4.23	100	100	100	66.19	650.440.000	430.550.250	12 Bulan
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.057.744.950	6.89	100	91.09	100	96.83	1.057.744.950	1.024.207.500	
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah aset yang diadakan	1 Buah	493.510.000	3.21	100	100	100	99.82	493.510.000	492.610.000	1 Buah
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah aset yang diadakan	5 set	65.000.000	0.42	100	100	100	99.34	65.000.000	64.570.000	5 set
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	32 Unit	499.234.950	3.25	100	81.12	100	93.55	499.234.950	467.027.500	26 Unit
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			971.035.200	6.32	100	100	100	88.57	971.035.200	860.056.960	
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	15.935.000	0.1	100	100	100	94.45	15.935.000	15.051.300	12 Bulan
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	414.000.000	2.69	100	100	100	87.96	414.000.000	364.153.260	12 Bulan

X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	541.100.200	3.52	100	100	100	88.87	541.100.200	480.852.400	12 Bulan
		Tersedianya makanan dan minuman	11 Bulan				0					11 Bulan
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.018.051.492	6.63	100	100	100	95.44	1.018.051.492	971.648.540	
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	324.190.000	2.11	100	100	100	87.37	324.190.000	283.254.240	12 Bulan
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	594.491.492	3.87	100	100	100	99.22	594.491.492	589.836.300	12 Bulan
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	99.370.000	0.65	100	100	100	99.18	99.370.000	98.558.000	12 Bulan
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			421.094.800	2.74	100	100	100	83.98	421.094.800	353.621.700	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			300.915.000	1.96	100	100	100	82.3	300.915.000	247.671.400	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	2Kemitraan	258.798.000	1.68	100	100	100	82.22	258.798.000	212.796.400	2Kemitraan
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	42.117.000	0.27	100	100	100	82.81	42.117.000	34.875.000	1 Dokumen
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			120.179.800	0.78	100	100	100	88.16	120.179.800	105.950.300	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan SektorInvestasi	8 Sektor	5.573.000	0.04	100	100	100	95.83	5.573.000	5.340.400	8 Sektor

2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai Standar	1 Dokumen	114.606.800	0.75	100	100	100	87.79	114.606.800	100.609.900	1 Dokumen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			977.129.600	6.36	100	100	100	88.65	977.129.600	866.168.350	
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			977.129.600	6.36	100	100	100	88.65	977.129.600	866.168.350	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah item media Promosi	6 Item	237.457.000	1.55	100	100	100	79.29	237.457.000	188.275.800	6 Item
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	739.672.600	4.81	100	100	100	91.65	739.672.600	677.892.550	4 Kali
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.155.447.800	7.52	100	100	100	85.08	1.155.447.800	983.119.000	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.155.447.800	7.52	100	100	100	85.08	1.155.447.800	983.119.000	
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Forum Fasilitasi Perusahaan	1 Kali	504.828.000	3.29	100	100	100	97.93	504.828.000	494.392.800	1 Kali
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Fasilitasi Investor	6 Kali	14.796.000	0.1	100	100	100	81.04	14.796.000	11.990.000	6 Kali
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Survey dan tersusunnya Dokumen IKM	2 Dokumen	96.179.800	0.63	100	100	100	86.31	96.179.800	83.012.000	2 Dokumen

2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi	1 Kali	539.644.000	3.51	100	100	100	72.96	539.644.000	393.724.200	1 Kali
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			688.155.900	4.48	100	100	100	67.73	688.155.900	466.092.400	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			688.155.900	4.48	100	100	100	67.73	688.155.900	466.092.400	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dpantau	13 Kali	151.131.000	0.98	100	100	100	30.36	151.131.000	45.886.900	13 Kali
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan	343.000.900	2.23	100	100	100	83.06	343.000.900	284.908.700	408 Perusahaan
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	194.024.000	1.26	100	100	100	69.73	194.024.000	135.296.800	324 Perusahaan
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			192.093.800	1.25	100	100	100	87.19	192.093.800	167.483.000	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			192.093.800	1.25	100	100	100	87.19	192.093.800	167.483.000	
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	

2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	12 Bulan	192.093.800	1.25	100	100	100	87.19	192.093.800	167.483.000	12 Bulan
Total				15.362.865.342	100	100	99.39	100	86.17	15.362.865.342	13.239.095.696	

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

NO	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi	Persentase
1.	Peningkatan Investasi	Program Pengembangan iklim penanaman Modal Program promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Rp2.086.380.300	Rp1.685.882.450	80,80%
2.	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Program pelayanan penanaman modal Program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Rp1.347.541.600	Rp1.150.602.000.	85.39%
3.	Peningkatan Nilai SAKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp11.928.943.442	Rp10.402.611.246	87,20%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

2020	
Program / Kegiatan	Pagu Dana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.496.206.000,00
•Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.355.000,00
•Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.800.000,00
•Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.000.000,00
•Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73.000.000,00
•Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.000.000,00
•Penyediaan Makanan dan Minuman	239.750.000,00
•Penataan Perpustakaan	66.856.000,00
•Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	333.945.000,00
•Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	240.000.000,00
•Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan Dan Penggandaan	93.500.000,00
•Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	575.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.006.477.000,00
•Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-

•Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	638.603.000,00
•Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	220.000.000,00
•Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	42.874.000,00
•Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	204.681.000,00
•Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD	9.850.000,00
•Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD	144.981.000,00
•Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat	49.850.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur	6.348.800,00
•Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	6.348.800,00
-	-
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	549.261.050,00
•Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah	80.867.900,00
•Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	62.806.900,00
•Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	26.610.200,00
•Forum Investasi Kalimantan Selatan	62.913.400,00

•Penyelenggaraan Pameran Investasi	264.688.250,00
•Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi	51.374.400,00
Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	366.903.100,00
•Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan	144.791.700,00
•Rapat Koordinasi Perizinan Dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan	117.828.200,00
•Pelayanan Penanaman Modal	104.283.700,00
•Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbaris ISO 9001	-
TOTAL PAGU	4.629.876.950,00

Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.928.943.442
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.307.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.165.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.142.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.381.194.800
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.138.625.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	229.199.800
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.370.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.557.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.143.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.414.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.257.052.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.597.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.983.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	317.332.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.998.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	139.700.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.440.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.057.744.950

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	493.510.000
Pengadaan Mebel	65.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	499.234.950
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	971.035.200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.935.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	414.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.100.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.051.492
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.190.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	594.491.492
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.370.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	421.094.800
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	300.915.000
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	258.798.000
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	42.117.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	120.179.800
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	5.573.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	114.606.800
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	977.129.600
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	977.129.600
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	237.457.000

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	739.672.600
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.155.447.800
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.155.447.800
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	504.828.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	14.796.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	96.179.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	539.644.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	688.155.900
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	688.155.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	151.131.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	343.000.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	194.024.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	192.093.800
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	192.093.800
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	192.093.800
Total Pagu 15.362.865.342	

No	2020		2021	
	Belanja Tidak Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.7,138,625,000	Belanja Operasi	Rp.14.302.691.892
	Belanja Langsung			
2.	Belanja Pegawai	Rp.852.000.000	Belanja Modal	Rp.1.060.173.450
3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.3.293.306.950		
4.	Belanja Modal	Rp484.570.000		
	Total	Rp.4.629.876.950,00	Total	Rp.14.362.865.342

b)

DEKONSENTRASI

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

1. Dasar Hukum

DIPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)
Nomor 065.01..3.159002/2021

2. Instansi Dekonsentrasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

3. Program dan Kegiatan

Program Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp191.260.000,00 atau 98,29 persen dari anggaran belanja sebesar Rp194.589.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	194.589.000	191.260.000	98,29 %
Total Belanja Kotor	194.589.000	191.260.000	98,29 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	194.589.000	191.260.000	98,29 %

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 27 proyek, adapun pelaksanaannya DPMPTSP dapat merealisasikan sebanyak 27 proyek sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

1. Dasar Hukum

DIPA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 010.04.3.484172/2021

2. Instansi Dekonsentrasi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)

3. Program dan Kegiatan

Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp220.660.000,00 atau 98,48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp224.055.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan KEMENDAGRI RI kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2021 Identifikasi dan inventarisasi data penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Kab/Kota se Kalsel dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan dan merealisasikan 1 Rekomendasi Kebijakan capaian kinerja 95%.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	224.055.000	220.660.000	98,48 %
Total Belanja Kotor	224.055.000	220.660.000	98,48 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	224.055.000	220.660.000	98,48 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran strategik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran strategik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2021 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021. Dengan demikian di dalam LAKIP Tahun 2021 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi sebesar 117,41%**, sedangkan capaian nilai IKM sebesar 105,00%. Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi ***sangat memuaskan***.

B. Solusi Mengatasi Kendala untuk Peningkatan Kinerja Mendatang

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut::

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.